

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Usulan Anggaran Pembangunan DKI Diefisienkan Rp 16,5 T

JAKARTA - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyepakati alokasi anggaran pembangunan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 sebesar Rp16,5 triliun. Alokasi anggaran ini didistribusikan ke tujuh satuan kerja perangkat daerah. "Besaran alokasi anggaran pembangunan DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar Rp1,29 triliun dari usulan alokasi anggaran dalam rancangan KUA-PPAS 2020 senilai Rp17,79 triliun," ungkap Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah kemarin.

Ida menyebutkan untuk Dinas Bina Marga sebesar Rp3,88 triliun, Dinas Sumber Daya Air Rp3,80 triliun, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp2,88 triliun, Dinas Kehutanan Rp2,62 triliun, Dinas Lingkungan Hidup Rp2,44 triliun, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Rp501 miliar, serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Rp1,2 miliar.

"Jadi, semuanya Rp17,79 triliun diefisienkan menjadi Rp16,5 triliun di Komisi D. Yang paling besar direncanakan pipanisasi SPAM Jatiuhur dari Rp497 miliar menjadi Rp168,7 miliar di SDA, dan di Dinas Kehutanan tentang usulan pembibitan tanaman Rp30 miliar sama kajian margasatwa dari Rp75 miliar menjadi Rp4 miliar, itu dua anggaran dinas yang efisiensinya besar," ujar Ida.

Kendati ada penurunan alokasi anggaran pada 2020 mendatang, Ida mengatakan pihaknya menunggu terlebih dahulu kompilasi proyeksi

anggaran riil yang akan disusun Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Selanjutnya, laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembahasan dan penetapan bersama Badan Anggaran (Banggar).

"Jadi, nanti di Banggar akan dirapatkan kembali apakah itu disetujui atau tidak, ya harusnya disetujui. Karena di Banggar nanti juga ada perwakilan dari anggota masing-masing komisi, untuk pelaksanaan rapat Banggar akan ditentukan kembali di rapat Bamus (Badan Musyawarah)," tandasnya.

Ida memastikan selaku ketua Komisi D akan memberikan argumen terbaik kepada seluruh komponen satuan tiga mata anggaran akan dikoreksi langsung bersama seluruh pimpinan dan anggota Banggar. "Selagi (anggaran) itu tidak signifikan, anggaran itu bisa disetujui. Karena saya sebagai pimpinan, juga punya kewajiban untuk mempertahankan apa yang sudah dirapatkan," ucapnya.

Postur APBD DKI Jakarta 2020 dinilai belum pro terhadap masyarakat. Kegiatan anggaran yang diusulkan eksekutif terlihat minim koordinasi. Hal tersebut ditegaskan oleh anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. Menurutnya, dari pembahasan KUA-PPAS yang dilakukan belakangan ini, banyak kegiatan anggaran yang tidak terkoordinasi dengan baik antara masing-masing perangkat daerah, seperti penataan trotoar yang di dalamnya terdapat saluran air, utilitas, dan parkir.

● bima setiyadi/
sindonews